

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas beberapa tinjauan terkait tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, PPKn sebagai Pendidikan Hukum di Sekolah Menengah Kejuruan dan PPKn dalam Kurikulum 2013 serta Kurikulum 2013 guna mendapatkan gambaran tentang permasalahan penelitian.

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum tentang PPKn

Sebagai salah satu bidang studi, PPKn yang memiliki tujuan menjadi warga negara yang memiliki komitmen terhadap NKRI serta dapat membekali peserta didik untuk mengembangkan penalarannya disamping aspek nilai dan moral, banyak memuat materi sosial. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang kita kenal saat ini adalah suatu mata pelajaran di sekolah dasar dan menengah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakat berbangsa dan bernegara serta kritis terhadap pemerintah melalui jalur pendidikan.

Pendidikan merupakan proses menumbuhkembangkan keberadaan peran peserta didik yang memasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global (Mikarsa, 2009:14). Selanjutnya menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai berikut:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Berdasarkan pengertian pendidikan di atas dapat di analisis bahwa pendidikan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendidikan mengandung pembinaan, dalam hal ini pembinaan kepribadian, pengembangan, peningkatan (adanya proses seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak tahu tentang dirinya menjadi tahu tentang dirinya) serta adanya tujuan untuk mengaktualisasikan diri semaksimal mungkin.
- b. Pendidikan terjadi karena adanya interaksi antara dua pihak yaitu pendidik dan peserta didik guna terlaksananya proses pendidikan.
- c. Pendidikan adalah proses sepanjang hayat dan perwujudan pembentukan diri manusia seutuhnya dalam arti pengembangan segenap potensi dalam pemenuhannya sebagai manusia individu, sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk Tuhan.

Dari uraian di atas kemudian pendidikan memiliki nilai besar bagi individu maupun masyarakat antara lain:

- a. Sarana membentuk pribadi yang memiliki iman dan taqwa kepada Tuhan YME, memiliki kepercayaan diri, disiplin dan tanggun jawab;
- b. Melestarikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, bangsa, dan bernegara;
- c. Membangun insan manusia yang ahli dan terampil serta berkarakter

- d. Mengembangkan nilai-nilai baru yang dianggap sesuai dan serasi oleh masyarakat dalam menghadapi tantangan perkembangan ilmu, teknologi dan dunia modern.
- e. Merupakan jembatan masa lampau, masa kini dan masa depan. Artinya, yang dilakukan pendidikan sekarang ini selain menggabungkan unsur-unsur yang dipandang baik di masa lampau juga senantiasa menatap masa depan. Pendidikan yang tidak mengantisipasi perkembangan masa depan akan selalu ketinggalan. Oleh karena itu perlu dilakukan inovasi-inovasi baru dalam pendidikan.

Berbicara mengenai nomenklatur pergantian kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Berkaitan dengan kebijakan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dijelaskan bahwa kurikulum sekolah merupakan suatu hasil interaksi antara pemerintah, pendidik profesional dan masyarakat yang saling memberikan pengaruh dan dalam memperebutkan kepentingan. Hal tersebut sejalan dengan PKn yang dikembangkan di beberapa negara, bahwa pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemerintah dalam kebijakan pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan (Samsuri, 2013: 3).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan nomenklatur yang digunakan pada kurikulum 1994, kemudian berganti dengan nama Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Sementara itu di era pemerintahan Jokowi kembali berganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagaimana kurikulum 2013 yang berlaku sekarang ini.

Menapaki jejak sejarah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sendiri pada tahun 1957 dikenal dengan nama “Kewarganegaraan”, yang bahasannya mengenai hak dan kewajiban warga negara serta cara-cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan. Sementara itu pada masa Orde Baru, Kewarganegaraan berganti menjadi Pendidikan Kewargaan Negara (PKN) sesuai dengan kurikulum 1968. Hampir seluruh isi materi ini dibuang karena dianggap tidak sesuai dengan tuntutan yang sedang berkembang.

Beralih ke pergantian kurikulum 1975, nama PKN kemudian dirubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang materinya didominasi dengan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Kemudian, pada tahun 1994 PMP diganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pada era reformasi substansi P4 dipermasalahkan, karena dianggap tidak memberikan gambaran yang tepat tentang nilai Pancasila. Selanjutnya pada tahun 2006 PPKn diganti menjadi PKn yang lebih menonjolkan akar keilmuan politik, hukum dan moral (Maftuh, 2008: 136).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyebutan nama baik nama PPKn atau PKn tidak perlu diperdebatkan karena pada dasarnya tujuan dari PPKn atau PKn adalah sama atau dapat dipahami bahwa mata pelajaran PPKn dapat dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan rezim yang berkuasa pada masa itu karena PPKn sendiri sarat dengan kepentingan serta nilai-nilai politik.

a. Pengertian PPKn dan Karakteristik PPKn

Pendidikan formal telah disiapkan melalui salah satu wahana untuk mempersiapkan warga negara yang sesuai dengan cita-cita nasional melalui disiplin ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum yang berlaku. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memberikan kontribusi bagi pendidikan untuk pembangunan karakteristik untuk menjadi seorang warga negara. PPKn pada dasarnya merupakan upaya pemerintah atau negara untuk mendidik dan mengembangkan karakter warganegara yang demokratis. Melalui pendidikan formal persekolahan inilah, anak dan generasi muda diharapkan mampu mempersiapkan dirinya sebagai warga negara yang baik. Tidak terbatas pada jalur pendidikan formal saja, akan tetapi PPKn juga dapat dilakukan lewat pendidikan masyarakat di luar sistem persekolahan.

Pendidikan Kewarganegaraan secara garis besar terdiri atas tiga rumpun keilmuan, yaitu ilmu hukum, ilmu politik, dan filsafat moral. Oleh karenanya, pendidikan kewarganegaraan sejak awal merupakan kajian interdisipliner termasuk di dalamnya aspek kependidikan. Secara akademik PPKn memiliki visi sebagai *nation and character building*. Upaya membangun karakter bangsa sendiri sebenarnya sudah dicanangkan sejak awal kemerdekaan. Soekarno sebagai salah satu pendiri bangsa telah menegaskan pentingnya *nation and character building* tersebut.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara luas berperan untuk penyiapan generasi muda untuk mengambil keterlibatan dan tanggung jawabnya sebagai warga negara serta peran pendidikan, termasuk didalamnya persekolahan,

pengajar dan proses belajar dalam penyiapan tersebut (Winataputera, 2012:4). Sementara itu PPKn juga memiliki kemampuan dasar yaitu untuk membekali peserta didik dalam menjalin hubungan antar warga negara serta usaha pembelaan negara yang berguna bagi bangsa dan negara (Somantri, 2001:154).

Penyiapan generasi muda tersebut tidak sekedar untuk mengambil peran dan tanggung jawab saja, akan tetapi warga negara juga harus memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara yang berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Permendiknas No. 22 Tahun 2006). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa PPKn merupakan mata pelajaran yang memiliki fokus pada pembinaan karakter warga negara dalam perspektif kenegaraan, dimana diharapkan melalui mata pelajaran ini dapat terbina warga negara yang baik (*good citizenship*). PPKn tidak hanya sekedar mengajarkan tentang Undang-Undang Dasar saja, akan tetapi lebih jauh PPKn mempelajari pola perilaku warga negara dengan warga negara lain serta mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

Adapun objek studi dari civics adalah perilaku, tipe pertumbuhan intelegensi, potensi yang ada dalam setiap diri warga negara, hak dan kewajiban, cita-cita dan aspirasi, kesadaran baik itu nasionalisme, patriotisme, pengertian internasional, dan moral Pancasila serta kegiatan dan partisipasi serta tanggung jawab (Somantri, 2001: 276). Oleh karena itu Winarno (2008: 114) memandang bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan karakter. Pendidikan karakter diartikan sebagai proses dimana anak/peserta didik belajar untuk melakukan penyesuaian sosial yang sehat didalam situasi yang membingungkan.

Terdapat tiga komponen utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan bagi bidang studi ini. Dalam PKN terdapat komponen pengetahuan (*civic knowledge*), ketrampilan (*civic skills*) dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) (Branson, 1999:8-26). Pencapaian ketiga komponen tersebut harus dicapai melalui pembelajaran, sebagaimana. Zuchdi (2008: 41-42) menyatakan bahwa:

“Untuk menjadi warga negara yang efektif diperlukan keterampilan berkomunikasi yang baik. Dengan mengekspresi sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai secara efektif, kita akan lebih mungkin memengaruhi orang lain sehingga nilai-nilai yang kita anut menjadi bagian dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat secara luas”.

Sementara itu, Thomas Jefferson sebagaimana penulis Deklarasi Kemerdekaan Amerika (Azis Wahab dan Sapriya, 2011: 294) menyatakan bahwa,

“that the knowledge, skills and behaviors of democratic citizenship do not just occur naturally in oneself, but rather they must be taught consciously through schooling to teach new generation, i.e they are learned behaviors.

Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa betapa pendidikan amat berperan dalam mendidik warga negara yang demokratis, yang menyiratkan dan mensyaratkan bahwa pendidikan itu sendiri haruslah demokratis serta dapat memberikan pengaruh moral yang baik kepada warga negara dan dilakukan dengan demokratis pula sebab pendidikan harus efektif yang didukung oleh faktor-faktor strategis lingkungan internal dan eksternal.

Selain itu, dimensi kewarganegaraan terdiri dari lima komponen, yaitu:

- 1) *Knowledge*: meliputi pengetahuan akan elemen penting dalam sistem politik dan hukum, partai politik, pemilu, hak dan tanggung jawab warga negara, sejarah, dan warisan budaya, keutamaan nilai dan norma, melekat politik dan memahami isu-isu politik.
- 2) *Skill dan competence*: meliputi kemampuan untuk mengevaluasi dan mengambil peran, membedakan antara pertanyaan berdasarkan fakta dan opini, mampu menyelesaikan konflik dengan cara damai.
- 3) *Attitudes*: merasa bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan diri sendiri dalam berinteraksi dengan warga negara lain, percaya diri untuk terlibat dalam politik, percaya dan setia untuk melangsungkan prinsip-prinsip demokrasi, terbuka terhadap perbedaan serta mampu bertukar pikiran.
- 4) *Value*: penerimaan terhadap peraturan hukum, kepercayaan terhadap keadilan sosial, kesederajatan dan perlakuan yang sama terhadap warga negara, menghormati perbedaan termasuk gender dan agama, menolak terhadap prasangka, rasisme dan diskriminatif, toleransi terhadap perbedaan
- 5) *Intended behavior/ disposition*: perhatian untuk berpartisipasi dalam komunitas politik, perhatian untuk aktif dalam komunitas, dan perhatian untuk berpartisipasi dalam masyarakat madani (Murray Print, 2013:45-46).

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa PPKn terdiri dari tiga rumpun keilmuan yaitu ilmu hukum, ilmu politik dan filsafat moral di mana target dari mata pelajaran PPKn yaitu melahirkan warga negara yang baik (cerdas,

terampil, dan berkarakter) yang mampu melaksanakan hak dan kewajibannya serta dapat memberikan pengaruh moral yang baik sesuai yang dicita-citakan oleh Pancasila dan UUD 1945.

b. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

PPKn memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menghadapi isu kewarganegaraan yang berkembang dimasyarakat. Tidak hanya itu saja keterlibatan secara aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta terhindar dari perilaku korup juga merupakan tujuan dari PPKn. Disamping itu semua pembentukan karakter-karakter masyarakat Indonesia dalam kehidupan yang demokratis serta pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pergaulan didunia adalah bagian dari tujuan PPKn agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya (Badan Standar Nasional Pendidikan, 2006: 78)

Sementara itu, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat memahami, menganalisa, serta menjawab berbagai konflik serta masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara secara tepat, rasional, konsisten, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dalam rangka mencapai tujuan nasional, menjadi warga negara yang tahu hak dan kewajibannya, menguasai ilmu , dan teknologi serta seni tanpa kehilangan jati dirinya sebagai warga negara (Sunarso, 2006: 15).

Sementara itu menurut Menurut Veldhuis (Samsuri, 2011: 28) tujuan pendidikan kewarganegaraan ialah untuk merangsang partisipasi aktif warga negara dalam masyarakat kewargaan dan dalam pembuatan keputusan politik di dalam

suatu (sistem) demokrasi konstitusional. Mengapa partisipasi menjadi penting dalam pendidikan kewarganegaraan? Veldhuis (Samsuri, 2011: 28) berpendapat bahwa keterlibatan dan penyatuan unsur (secara sosial dan politik) dari para warga negara menjadi dasar yang penting. Warga negara yang demokratis diwujudkan melalui proses sosialisasi dan bukan merupakan bawaan lahiriah. Demokrasi penting untuk dipahami dan dipelihara, di mana para pendidik *civic* dan politik serta institusi profesional yang terkait harus turut bertanggung jawab. Karakter warga negara dapat dikelompokkan menurut skala yang “sangat buruk” hingga “sangat baik”. Penyebutan “warga negara yang baik” (*good citizen*) tersebut tergantung kepada nilai-nilai dari konsep skala tersebut.

Bila kita telaah, Pendidikan Kewarganegaraan harus memiliki fungsi sebagai pendidikan nilai, moral dan norma, sebagai pendidikan politik, dan sebagai pendidikan keilmuan. Senada dengan pendapat yang dilontarkan Hargreaves (1996) “*Active citizens are as political as they are moral; moral sensibility derives in part from political understanding; political apathy spawns moral apathy*”, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter atau/ dapat disebut juga sebagai pendidikan karakter warga negara yang baik (*Good Citizen*)

yang dalam hal ini dipertegas oleh pendapat Ungood-Thomas (1997) bahwa seluruh sekolah harus membelajarkan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai, karakter dan kewarganegaraan. Seperti halnya di negara Inggris, kewarganegaraan menjadi subjek dasar dalam kurikulum nasional untuk siswa berusia 11-16 tahun sejak Agustus 2002 dan menjadi kerangka kerja dalam bingkai *Personal Social and Health Education* untuk siswa berusia 5-11 tahun dengan tujuan agar peserta didik dapat

mempelajari pengetahuan dan pemahaman tentang menjadi warga negara yang mengerti informasi; mengembangkan keterampilan penyelidikan dan komunikasi; mengembangkan keterampilan partisipasi dan tindakan yang bertanggung jawab (Davies, Gorard, & McGuinn, 2005: 342-343).

c. Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1990-an, di beberapa negara dipahami secara berbeda-beda. Dari kajian Print (Samsuri, 2011: 30) terhadap pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di Asia dan Pasifik, ditemukan ada penyebutan pendidikan kewarganegaraan sebagai “*civic education*” yang mencakup kajian tentang pemerintahan, konstitusi, *rule of law*, serta hak dan tanggung jawab warga negara. Sementara yang lain, penyebutan pendidikan kewarganegaraan dengan “*citizenship education*” dengan cakupan dan penekanan kajian meliputi proses-proses demokrasi, partisipasi aktif warga negara, dan keterlibatan warga negara dalam suatu *civil society*. Ada juga yang membuatnya menjadi satu mata pelajaran tersendiri, akan tetapi ada juga yang mengintegrasikan secara terpadu dengan mata pelajaran lain. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia termasuk mata pelajaran yang berdiri sendiri.

Ruang lingkup *Civic Education* Dede Rosyada, dkk (2003: 11) memiliki materi inti/pokok yaitu demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani (*civil society*), yang kemudian dijabarkan menjadi bahan kajian menjadi 10 dalam pembelajaran yaitu (1) Pendahuluan; (2) Identitas Nasional; (3) Negara; (4)

Kewarganegaraan; (5) Konstitusi; (6) Demokrasi; (7) Otonomi Daerah; (8) *Good Governance*; (9) HAM; dan (10) Masyarakat Madani.

Sementara itu PPKn dalam kurikulum 2013 saat ini menurut Balitbang Pusat Kurikulum Buku (2012) menjelaskan bahwa ruang lingkup PPKn Kurikulum 2013, antara lain:

- 1) Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
- 2) UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional. kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 4) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara Indonesia

Salah satu pertimbangan PKn berubah kembali menjadi PPKn sebagaimana ruang lingkup diatas adalah karena pada kurikulum 2006, Pancasila tidak dimunculkan secara eksplisit sehingga seolah hilang. Oleh karena itu, pada saat ini Pancasila dimunculkan kembali untuk mengingatkan bahwa karakteristik Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia berlandaskan kepada Pancasila.

d. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Kejuruan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang dirancang untuk membekali siswa dengan keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Melalui pembelajaran PPKn, siswa dipersiapkan untuk dapat berperan sebagai warga negara yang efektif dan bertanggung jawab. Pembahasannya secara umum mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Kompetensi yang dibentuk melalui pembelajaran PPKn untuk Pendidikan Menengah haruslah mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan ketrampilan sebagaimana kurikulum 2013 saat ini. PPKn sebagai pengetahuan diajarkan untuk membuat peserta didik terampil dalam mengaplikasikan pengetahuan PPKn tersebut, pembelajaran PPKn juga diharapkan dapat membentuk peserta yang memiliki sikap sebagai seorang warga negara yang taat dan meyakini falsafah hidup bangsa Indonesia dalam kesehariannya. Dengan demikian kompetensi lulusan pendidikan menengah mampu menjadi cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah, terdiri atas Kelompok Mata pelajaran Wajib dan Mata pelajaran Pilihan disusun untuk menampung kesamaan muatan antara SMA/MA dan SMK/MAK, maka dikembangkan Mata pelajaran wajib mencakup 9 (sembilan) mata pelajaran dengan beban belajar 24 jam per

minggu. Peserta didik merupakan subjek dalam belajar yang memiliki hak untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya sebagaimana penerapan prinsip dalam struktur ini. Berikut mata pelajaran pendidikan menengah sebagaimana tabel 1.

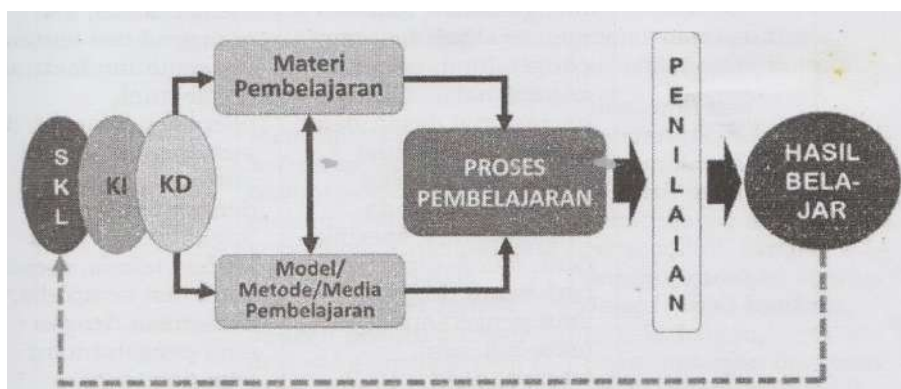
Tabel 1
Mata Pelajaran Pendidikan Menengah

Nama	Alokasi Waktu Per Minggu		
	X	XI	XII
Kelompok A (Wajib)			
1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3 Bahasa Indonesia	4	4	4
4 Matematika	4	4	4
5 Sejarah Indonesia	2	2	2
6 Bahasa Inggris	2	2	2
Kelompok B (Wajib)			
7 Seni Budaya	2	2	2
8 Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3
9 Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok A dan B per minggu	24	24	24
Kelompok C (Peminatan)			
Mata Pelajaran Peminatan Akademik (SMA/MA)	18	20	20
Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan Vokasi (SMK/MAK)	24	24	24
Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh Perminggu (SMA/MA)	42	44	44
Jumlah Jam Pelajaran yang Harus Ditempuh Perminggu (SMK/MAK)	48	48	48

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa mata pelajaran Kelompok A dan C adalah mata pelajaran dikembangkan oleh pusat. Sementara itu, mata pelajaran kelompok B adalah kelompok mata pelajaran yang dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.

Jika melihat tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa PPKn merupakan salah satu mata pelajaran muatan wajib yang harus diberikan pada tingkat SMA/SMK. Tuntutan kurikulum 2013 tidak hanya ditujukan untuk dilaksanakan oleh sekolah saja tetapi guru juga memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut dengan melaksanakan proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan kurikulum 2013. Dalam pembelajaran, guru diharapkan dapat menjadikan nilai-nilai karakter sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang nantinya dapat mewarnai aspek-aspek dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran baik dalam media maupun metode pembelajaran serta penilaian hasil belajar.

Kurikulum 2013 mempunyai empat kompetensi inti dimana kompetensi inti ini merupakan tangga pertama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada satuan program pendidikan. Berikut merupakan alur proses pembelajaran dan penilaian sebagaimana gambar 1.



Gambar 1. Skema Hubungan SKL, KI, KD, Pembelajaran, Penilaian dan Hasil Belajar (Sumber: Materi Pokok Pelatihan dan Pendampingan K13

SMK, 2018:5)

Melihat skema di atas dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan pembelajaran kurikulum 2013, guru harus memperhatikan beberapa hal sebagaimana di jelaskan sebelumnya. Selain itu, PPKn sendiri, dalam Materi Pokok Pelatihan dan Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (2018:6) memberi penjelasan bahwa dalam Kurikulum 2013, guru Pendidikan Agama, PPKn, BK, dan wali kelas juga dapat melakukan penilaian sikap sebagaimana skema penilaian sikap sebagai berikut:



Gambar 2.
Skema Penilaian Sikap

Berdasarkan skema di atas dapat di jelaskan bahwa Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dan PPKn melakukan penilaian sikap (spiritual dan sosial) melalui pengamatan, guru mata pelajaran dan guru Bimbingan Konseling (BK) mengamati, mengumpulkan data, dan membuat catatan singkat mengenai nilai sikap yang sangat baik dan kurang baik (perlu bimbingan) dari peserta didik pada jurnal. Hasil catatan singkat berupa jurnal yang dibuat guru mata pelajaran dan guru BK

dilaporkan kepada wali kelas yang nantinya wali kelas akan merekap hasil catatan-catatan dan merumuskan hasilnya dalam bentuk deskripsi.

2. Tinjauan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai Pendidikan Hukum

a. Pendidikan Hukum

Pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, pendidikan moral/karakter merupakan bagian dari misi PKn. Salah satu misi PKn adalah untuk meningkatkan keterampilan keterlibatan warga Negara dalam mengembangkan dan memelihara sistem politik demokrasi Pancasila sebagaimana PKn sebagai pendidikan demokrasi. Sedangkan sebagai pendidikan hukum misi PKn adalah menciptakan warga negara yang sadar hukum (Cholisin, 2010:1).

Indonesia merupakan negara hukum yang bertujuan menyelenggarakan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil, sehingga hak-hak dasar warga negara betul-betul dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Sebagaimana pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo (1999:5), mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa sifat hukum dari “memaksa” menjadi “mengikat” membutuhkan suatu proses, yaitu proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri setiap anggota masyarakat. Proses internalisasi nilai-nilai hukum dalam diri masyarakat tersebut dilakukan melalui pendidikan hukum. Pendidikan hukum dengan demikian tidak hanya bertugas mensosialisasikan atau mentransfer teori ataupun pasal-pasal hukum, namun harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran akan pentingnya peraturan hukum bagi kehidupan pribadi dan kehidupan bersama..

Sementara itu, dalam pendidikan di tingkat persekolahan/ perguruan tinggi, PPKn merupakan bidang kajian keilmuan, program kurikuler, dan aktivitas sosial-kultural yang bersifat multidimensional. Sifat multidimensional ini menyebabkan PPKn dapat disikapi sebagai: pendidikan nilai dan moral, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, serta pendidikan demokrasi.

PPKn merupakan mata pelajaran yang mempunyai misi sebagai pendidikan nilai dan moral Pancasila, penyadaran akan norma dan konstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengembangan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan penghayatan terhadap filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Upaya untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian yang penting dalam PPKn.

Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah berupaya untuk mengembangkan kualitas warga negara dalam berbagai aspek sebagai berikut:

1. Pemahaman sebagai warga negara (*civic literacy*), yakni pemahaman peserta didik mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan demokrasi sesuai dengan perilaku yang menunjukan pemahaman dan kesadaran tersebut..
2. Komunikasi sosio kultural kewarganegaraan (*civic engagement*) yakni kemampuan dan kemauan peserta didik untuk terlibat dalam komunikasi sosial kultural sebagaimana dengan hak dan kewajibannya.
3. Kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara (*civic skill and participation*), yakni kemauan, kemampuan, dan ketrampilan peserta didik dalam mengambil inisiatif pemberian solusi atas permasalahan sosio kultur kewarganegaraan di lingkungannya
4. Penalaran kewarganegaraan (*civic knowladge*), yakni kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan bertanggung jawab.
5. Partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab (*civic participation dan civic responsibility*), yakni kesadaran dan kesiapan peserta didik untuk terlibat secara aktif dan penuh tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi konstitusional. (Dokumen Standar Kompetensi Guru Kelas mata Pelajaran PKn Depdiknas, 2004)

Sebagaimana uraian di atas, misi PPKn sebagai pendidikan hukum warga negara dapat diwujudkan dengan pengembangan baik dari segi materi, metode,

media, serta evaluasi pembelajaran dalam proses pembelajaran di sekolah. pemahaman terhadap materi mengenai hak dan kewajiban warga negara tersebut juga merupakan cerminan/ wujud dari bagaimana misi PPKn sebagai pendidikan hukum dapat terealisasi di sekolah.

Sementara itu menurut Helen Lawson and David Scott (2002:50) mengatakan bahwa :

“Citizenship education is not just about the identity question, as I argued above, but arises more from concerns about the perceptions young people appear to have about civic duties and obligations, and the need to persuade them to participate in political processes, to understand the need for compromise, and to accept the decision-making processes”.

Pendidikan kewarganegaraan bukan hanya tentang pertanyaan identitas, tetapi lebih memunculkan persepsi generasi muda untuk memiliki tugas-tugas kewarganegaraan dan tanggung jawab, mengajak mereka berpartisipasi dalam proses politik, memahami kebutuhan bersama serta mengajak mereka untuk menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa PPKn disini memunculkan persepsi bahwa terdapat tugas-tugas kewarganegaraan dan tanggung jawab yang dapat diartikan ada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban warga negara termasuk di dalamnya kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum. Artinya tidak sekedar politik saja tetapi *rule of law* jg harus dilaksanakan dengan baik.

PPKn memiliki substansi yang sifatnya moral dan pengetahuan. Walaupun substansi PPKn hanya terdiri atas moral Pancasila dan pengetahuan

kewarganegaraan, kedua substansi ini saling terkait dengan pendidikan politik, hukum, dan nilai karena unsur-unsur yang terdapat dalam substansi tersebut merupakan suatu rumpun pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Somantri, 2001:167),

Tabel 2
Kurikulum PPKn

Pendidikan Pancasila	Pendidikan Kewarganegaraan	Pendidikan Politik	Pendidikan Hukum	Pendidikan Nilai
Moral Pancasila	Pengetahuan kewarganegaraan, hubungan warga negara dengan negara, patriotisme bela negara, ketahanan nasional	Pengetahuan yang berkenaan kehidupan politik dalam negara, sistem kekuasaan, mengatur kehidupan, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi	Pengetahuan yang berkenaan dengan filsafat hukum, rule of law, dengan tujuan menegakan keadilan	Pengetahuan yang bermuatan nilai yang bermuara pada nilai sentral (central values)

(Sumber: Numan Somantri, 2001:167)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam PPKn memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan hukum. PPKn sebagai pendidikan hukum maksudnya adalah pendidikan hukum dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum atau negara demokrasi berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan (3). Sementara itu, *Internasional Commission of Jurist* yang merupakan organisasi ahli hukum internasional dalam konferensiya di Bangkok 1965 memposisikan PPKn sebagai salah satu syarat-syarat dasar bagi terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah *rule of law*.

Syarat-syarat dasar sebagaimana penjelasan sebelumnya meliputi:

- a. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa adanya jaminan terhadap hak-hak warga negara termasuk upaya perlindungan bagi pelanggaran hak-hak tersebut
- b. Adanya badan kehakiman yang tidak memihak (adil);
- c. Pemilihan umum yang bebas;
- d. Kebebasan menyatakan pendapat;
- e. Kebebasan berserikat untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi;
- f. Pendidikan kewarganegaraan (Meriam Budiarjo, 2002:60).

Berkenaan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum, Bunyamin Maftuh (2008:137) menjelaskan bahwa PKn sebagai pendidikan hukum memiliki arti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, PPKn di tingkat persekolahan dapat disimpulkan bertujuan untuk mempersiapkan para peserta didik menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*) berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Warga negara yang di maksud adalah warga negara yang menguasai pengetahuan (*knowledge*), sikap dan nilai (*attitudes and values*) , keterampilan (*skills*) yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta dapat membina peserta didik untuk memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum sebagai implementasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

b. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar”, tahu, mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Dengan kata lain, sadar hukum adalah suatu kondisi dimana masyarakat mau menghargai dan mau untuk mematuhi hukum dengan kesadaran sendiri tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun (Suherman Toha , 2011:19).

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo (2008:5-6) mengatakan bahwa kesadaran hukum erat hubungannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk dari kebudayaan. Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai melalui pendidikan.

Lebih lanjut Soekanto, S (1982; 159) menyatakan kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia , tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Selanjutnya dengan mengacu pada pendapat B. Kutschincky , menyatakan hal-hal yang menjadi indikator kesadaran hukum adalah :

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum

c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum

d. Pola-pola perikelakuan hukum (Soekanto, 1982; 159).

Pengetahuan hukum maksudnya mengetahui tentang hukum yang mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat (tertulis maupun tidak tertulis), mengetahui perilaku-perilaku yang dilarang dan diperbolehkan oleh hukum, mengetahui sanksi yang diberikan apabila melanggar hukum. Sementara itu pemahaman hukum merupakan pengakuan terhadap hukum yang telah diketahui serta dipahami oleh individu. Selain pengetahuan dan pemahaman hukum, terdapat sikap hukum yaitu penilaian seseorang terhadap hukum yang berlaku serta perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat,

Tentunya pendidikan hukum dalam PPKn tersebut tidaklah pendidikan yang bersifat einmalig atau insidentif, akan tetapi merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan dan terus menerus dalam hal ini pendidikan kesadaran hukum yang prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif atau secara terus menerus, hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukumnya baru dapat dilihat hasilnya dalam bentuk sikap atau perilakunya, sebagai kewajiban warga masyarakat mentaati hukum, sebagai bagian dari kesadaran bernegara dan sebagai warga-warga yang baik kewajiban tersebut harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran.

3. Kurikulum 2013

a. Pengertian Kurikulum

Finch & Crunkilton (1999: 7) mengungkapkan kurikulum adalah “ *the sum of learning activities and experiences that a student has under the mosepieces or directions of the school.*” Maksudnya adalah kegiatan dan pengalaman belajar yang dialami oleh anak didik di bawah pengarahan dan tanggung jawab pihak/ lembaga sekolah. Sekolah atau lembaga pendidikan termasuk staf pengajar membimbing dan memiliki tanggung jawab untuk keberlangsungan proses belajar mengajar melalui rencana yang disusun atau sering disebut sebagai kurikulum (Nasution, 2006: 5) Definisi kurikulum yang lain juga dapat diartikan sebagai suatu perencanaan yang memiliki tujuan, materi, dan pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan peserta didik baik serta evaluasi yang disusun guna mencapai tujuan pendidikan (Ahmad Yani, 2014:6).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana yang berisi tujuan, materi, dan pedoman penyelenggaraan dalam pelaksanaan pembelajaran peserta didik di sekolah.

b. Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dibuat seiring dengan adanya kemerosotan karakter bangsa Indonesia yang beranjak dari banyaknya tindakan korup dari beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab, pemakaian narkoba, pembunuhan, kekerasan, serta tindakan pelanggaran hukum yang lain adalah fenomena yang menunjukkan penurunan dari kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang lupa akan

fondasi moral dan spiritual bangsa Indonesia. (Mulyasa, 2013:14). Selain itu, pengembangan kurikulum 2013 juga didasari oleh beberapa hasil riset atau penelitian internasional yang dilakukan oleh Global Institute dan Programme for International Student Assessment (PISA) merujuk pada suatu simpulan bahwa prestasi peserta didik Indonesia tertinggal dan terbelakang (Mulyasa, 2013: 60).

Kurikulum 2013 dikembangkan dari kurikulum 2006 (KTSP) yang dilandasi pemikiran tentang tantangan masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, kompetensi masa depan, dan fenomena negatif yang mengemuka (Pedoman Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013, 2013: 4). Berikut tabel tentang perubahan pola pikir kurikulum 2013:

Tabel 3
Perubahan Pola Pikir Pada Kurikulum 2013

No	KBK 2004	KTSP 2006	Kurikulum 2013
1	Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari Standar Isi		Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari kebutuhan
2	Standar Isi dirumuskan berdasarkan Tujuan Mata Pelajaran (Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran) yang dirinci menjadi Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran		Standar Isi diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan melalui Kompetensi Inti yang bebas mata pelajaran
3	Pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan		Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan
4	Kompetensi diturunkan dari mata pelajaran		Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai
5	Mata pelajaran lepas satu dengan yang lain, seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah		Semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti (tiap kelas)

Kurikulum 2013 memiliki empat kompetensi inti (KI) yang berisi tujuan dari proses pembelajaran. Adapun rumusan kompetensi inti antara lain:

1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) merupakan kompetensi inti sikap spiritual;
2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) merupakan kompetensi inti sikap sosial;
3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) merupakan kompetensi inti pengetahuan; dan
4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) merupakan kompetensi inti keterampilan.

Sebagai kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi, kurikulum 2013 tidak hanya menekankan kepada penguasaan kompetensi siswa, akan tetapi juga karakter peserta didik sebagaimana PPK (penguatan pendidikan karakter) yang diintegrasikan dalam kurikulum saat ini. Sesuai dengan kompetensi inti (KI) yang telah ditentukan oleh Kemendikbud, KI 1 dan KI 2 berkaitan dengan tujuan pembentukan karakter siswa atau dalam hal ini ranah afektif, sedangkan KI 3 dan KI 4 berkaitan dengan penguasaan pengetahuan (*knowledge*) peserta didik (Mulyasa, 2013: 163).

c. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013

Dalam melaksanakan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar, guru dituntut untuk menyiapkan administrasi, salah satunya yaitu penyusunan RPP yang biasanya dibuat sebelum awal pembelajaran dimulai. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat sebelum mengajar guru perlu mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dan disampaikan kepada peserta didik. Dalam penyusunan RPP diperlukan beberapa persiapan agar nantinya melaksanakan kegiatan belajar mengajar tersebut berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin di capai.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang telah ditetapkan, dan merupakan komponen yang penting dari Kurikulum 2013 yang pengembangannya harus dilaksanakan secara professional. Tugas guru paling utama di sini adalah menjabarkan silabus ke dalam RPP yang lebih operasional dan rinci agar dijadikan sebagai pedoman atau skenario dalam pembelajaran.

Setiap guru berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berperan aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik.

Penyusunan RPP harus berdasarkan pengetahuan terhadap visi, misi, tujuan, kemampuan, sikap, kebutuhan, dan minat peserta didik, isi kurikulum dan unit pelajaran yang disediakan dalam bentuk mata pelajaran, serta teknik-teknik pembelajaran jangka pendek. Terdapat dua hal yang mempengaruhi penetapan perencanaan antara lain pemahaman guru terhadap materi yang diajarkan dan pemahaman guru terhadap manajemen serta pengalokasian waktu dalam mengimplementasikan kegiatan pembelajaran. Kedua hal tersebut merupakan hal yang penting untuk penyusunan RPP yang efektif dalam keberhasilan pelaksanaan pembelajaran (Ornstein, 1990:465-466).

RPP terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 dikemukakan bahwa komponen RPP terdiri atas berikut ini :

1. Nama Sekolah
2. Nama mata pelajaran
3. Kelas dan semester
4. Materi yang diajarkan
5. Alokasi waktu. Alokasi waktu ini disesuaikan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar yang ingin dicapai.
6. Tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar, dengan menggunakan kata kerja operasional meliputi sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
7. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi
8. Materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.
9. Metode pembelajaran, digunakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik.
10. Media pembelajaran merupakan alat bantu dalam proses pembelajaran untuk menyampaikan materi.

11. Sumber belajar, berbagai sumber belajar yang dapat digunakan untuk kepentingan belajar, bisa berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan.
12. Prosedur pembelajaran, yang mencakup kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup
13. Penilaian pembelajaran, baik penilaian proses maupun hasil pembelajaran

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa guru harus memiliki rencana pembelajaran yang matang sebelum melaksanakan pembelajaran, baik persiapan tertulis maupun tidak tertulis. Sebagaimana Joseph dan Leonard (1997:20) mengungkapkan: *“Teaching without adequate written planning is sloppy and almost always ineffective, because the teacher has not thought out exactly what to do and how to do it”*.

Uraian diatas menjelaskan betapa pentingnya rencana pembelajaran bagi terselenggaranya kurikulum di sekolah. Melalui penyusunan perencanaan pembelajaran, guru dapat mengelompokkan kompetensi standar yang akan dicapai dalam pembelajaran agar dapat fokus dan terarah.

Menurut Mulyasa (2018: 22-23), guru merupakan pengembang kurikulum di kelasnya, yang akan menerjemahkan, menjabarkan, dan mentransformasikan nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum kepada peserta didik. Adapun langkah-langkah yang dapat dilaksanakan oleh guru dalam mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah :

1. Mengidentifikasi dan mengelompokkan kompetensi yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran. Kompetensi yang dikembangkan harus mengandung muatan yang menjadi materi standar, yang dapat diidentifikasi berdasarkan kebutuhan peserta didik, kebutuhan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan filsafat.
2. Mengembangkan materi standar. Materi standar merupakan bahan pembelajaran berkenaan dengan jawaban di atas, “apa yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk membentuk kompetensi?”
3. Menentukan metode. Penentuan metode pembelajaran erat kaitannya dengan pemilihan strategi pembelajaran yang paling efisien dan efektif, dalam memberikan pengalaman belajar yang diperlukan untuk membentuk kompetensi dasar
4. Langkah keempat atau langkah terakhir dalam mengembangkan RPP adalah merencanakan penilaian. Penilaian hendaknya dilakukan berdasarkan apa yang dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi

Tyler (1996) mengatakan bahwa penilaian pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui tercapai tidaknya pembelajaran yang telah dilaksanakan, yang mencakup semua komponen pembelajaran, baik proses maupun hasilnya.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum dalam Kurikulum 2013. Penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu :

1. Hasil penelitian oleh Isep, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2012 dengan judul Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum di kalangan Peserta Didik (studi kasus di Madrasah Aliyah Negeri Tanggeung Kabupaten Cianjur). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil penelitian adalah materi pembelajaran PKn yang diharapkan mampu memberikan informasi tentang hukum-hukum yang berlaku di masyarakat dirasakan masih kurang. Sedikitnya porsi materi pokok tentang hukum dibanding dengan politik dan ketatanegaraan, alokasi waktu yang tidak proporsional dan dominannya penyampaian *formal content* menyebabkan pemahaman peserta didik terhadap hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat masih jauh dari harapan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Isep adalah dalam penelitian ini sama-sama melakukan pembahasan terkait pendidikan hukum dalam PPKn. Dalam hal ini PPKn sebagai mata pelajaran yang tidak hanya memuat materi tentang politik, nilai (moral) saja akan tetapi juga materi pendidikan hukum terdapat dalam materi-materi yang diajarkan dalam pembelajaran PPKn di kelas. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak hanya membahas mengenai materi saja, akan tetapi media, metode, serta evaluasi pembelajaran pendidikan hukum dalam PPKn di SMK N 2 Pengasih juga

diteliti. Disamping itu perbedaan yang lebih nampak yaitu kurikulum yang di laksanakan pada penelitian sebelumnya berdasarkan dengan kurikulum KTSP, sementara itu penelitian ini dilaksanakan sebagaimana kurikulum yang berlaku sekarang, yaitu kurikulum 2013.

2. Hasil penelitian oleh Dwi Wijayanti, Program Pasca Sarjana, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014 dengan Judul Politik Pendidikan Indonesia dalam Membentuk Good Citizens pada Era Reformasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis isi dengan hasil penelitan sebagai berikut: Pertama, PKn sebagai instrumen politik pendidikan dalam membentuk good citizens, yaitu dalam Kurikulum KTSP 2006 materi terdiri dari politik, hukum dan moral. Arah politik pendidikan adalah untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, sadar akan hak dan kewajiban, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara itu, dalam Kurikulum 2013 arah politik pendidikan sebagaimana yaitu untuk mempersiapkan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kedua, muatan *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition* pada buku PKn era Reformasi yaitu Kurikulum KTSP 2006 lebih banyak memuat aspek pengetahuan (*civic knowledge*) dan keterampilan (*civic skill*) berupa politik dan hukum, sedangkan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) kurang dikembangkan dan pada Kurikulum 2013 muatan *civic disposition* lebih dominan yang dapat dilihat melalui aspek sikap (sikap

spiritual dan sosial) dan kurang mengembangkan aspek pengetahuan (civic knowledge) serta keterampilan (civic skill). Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi adalah salah satu aspek dari penelitian ini ada pembahasan mengenai bagaimana materi dalam PPKn. Sementara itu untuk perbedaannya sendiri adalah penelitian ini tidak saja membahas serta memotret seperti apa materi PPKn yang berdimensi hukum akan tetapi juga seperti apa media, metode, dan evaluasi pembelajaran PPKn dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

C. Kerangka Pikir

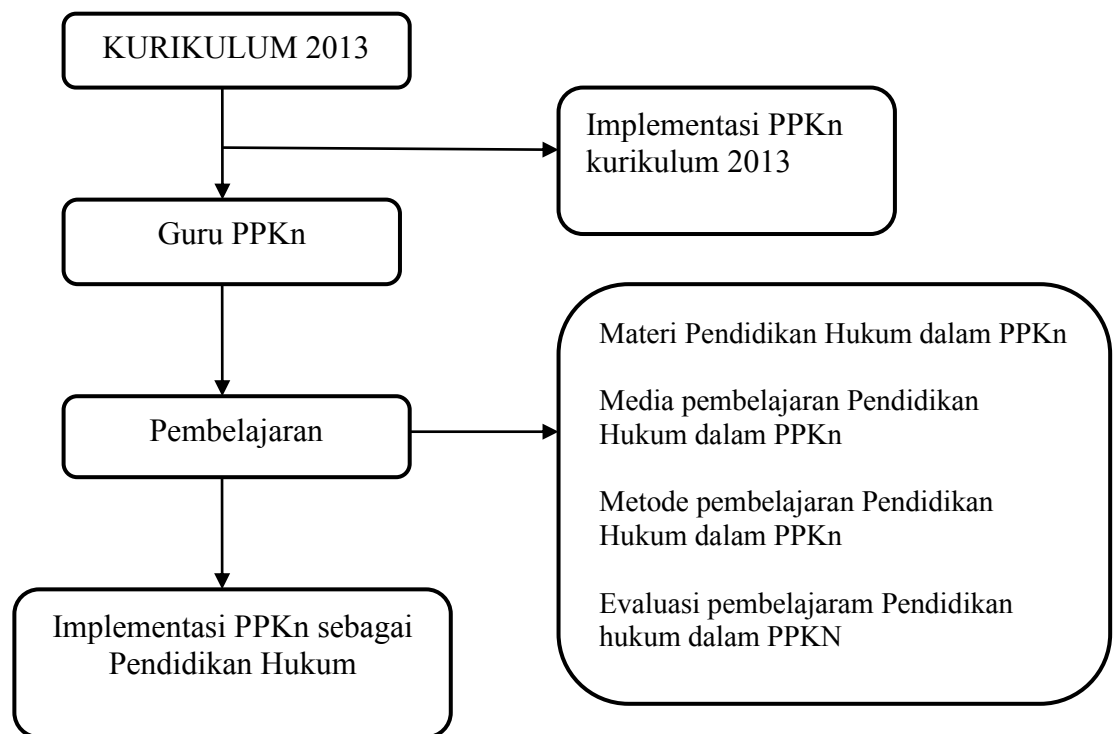
Kurikulum adalah seperangkat rencana, tujuan dan isi sebuah pembelajaran serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perubahan Kurikulum 2006 atau yang lebih kita kenal KTSP menjadi Kurikulum 2013 menuntut guru menjadi lebih kreatif dan inovatif guna membangkitkan minat belajar siswa, karena pembelajaran dalam Kurikulum 2013 lebih menekankan pada keaktifan siswa.

Dalam pembelajaran guru dituntut untuk dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran PPKn sesuai dengan kurikulum 2013 sehingga guru nantinya tidak semata-mata hanya memberikan kontribusi bagi pemahaman serta penanaman sikap yang baik bagi peserta didik akan tetapi dapat memilih metode serta media apa yang sesuai dengan materi PPKn tersebut.

Hal tersebutnya tentu juga memberi tantangan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran sebagai upaya untuk memberikan pengetahuan bagi peserta didik

terkait dengan pendidikan hukum dalam pembelajaran PPKn kelas XII di Sekolah Menengah Kejuruan. Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami dengan jelas betapa pentingnya proses pembelajaran PPKn sebagai Pendidikan Hukum dalam Kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Kejuruan.

Berikut ini merupakan gambaran atau ilustrasi skema kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Gambar 3.
Kerangka Pikir

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Apa materi pendidikan hukum dalam pembelajaran PPKn kelas XII di SMK N 2 Pengasih?
- 2 Apa saja media pembelajaran pendidikan hukum dalam pembelajaran PPKn kelas XII di SMK N 2 Pengasih?
- 3 Apa saja metode pembelajaran pendidikan hukum dalam pembelajaran PPKn kelas XII di SMK N 2 Pengasih?
- 4 Apa saja evaluasi pembelajaran pendidikan hukum dalam pembelajaran PPKn kelas XII di SMK N 2 Pengasih?